



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PAINAN

TAHUN ANGGARAN 2024

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah **Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan** per 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana Posisi Keuangan Tahun 2024 adalah sbb :

Anggaran	Rp	335.591.670.577,00
Jumlah Realisasi	Rp.	312.658.466.214,16
Sisa UYHD	Rp	7.971,841
Contra Post	Rp.	45.224.380
Saldo	Rp.	22.933.204.362,84

Painan, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



AGUSTINA RAHMADANI S.ST MM
NIP. 19790810 200312 2 006

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan	1
	1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Lapora Keuangan	1
	1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	2
	1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
	1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	
	2.1 Ekonomi Makro	5
	2.2 Kebijakan Keuangan	5
	2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	7
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	10
	3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	13
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	
	4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	18
	4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	19
	4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	21
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
	5.1 Laporan Relaisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	23
	5.2 Neraca	25
	5.3 Laporan Operasional	30
	5.4 Laporan Perubahan Ekuitas	32
BAB VI	PENUTUP	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunianya Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 telah dapat tersusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara selaku Entitas Akuntansi berkewajiban menyelenggarakan Penatausahaan dan Akuntansi atas pelaksanaan DPA Organisasi Perangkat Kerja dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meskipun masih banyak kekurangan-kekurangannya. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dikompilasi dan menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Diharapkan, melalui media pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan DPA di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



AGUSTINA RAHADANI S.ST
NIP. 19790810 200312 2 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kesehatan, perlu adanya fasilitas serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola bidang kesehatan.

Pengelolaan bidang kesehatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 162 Tahun 2021, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kesehatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang kesehatan
- d. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2024, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca

merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Kesehatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Dinas Kesehatan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA/DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trce back) pos-pos laporan keuangan.

1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, serta sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Memuat informasi tentang Ekonomi Makro (Pertumbuhan Ekonomi, Struktur Perekonomian Daerah, Pendapatan Perkapita, Kemiskinan, Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia) Kebijakan keuangan dan Target APBD.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat informasi tentang Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada sdalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat informasi tentang entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasar penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan, yang meliputi : Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Beban dan Komponen-komponen Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB VI PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dibidang Kesehatan diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta kualitas hidup sehat, peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kesehatan.

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan dengan beberapa sasaran yang mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

2.2. Kebijakan Keuangan

2.2.1 Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kasda
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga, dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar)
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

2.2.2 Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah (Kasda) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kasda.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
- Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

2.2.3 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Kebijakan Keuangan yang diambil yaitu kebijakan aspek belanja, dimana kebijakan dibidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik dan belanja tidak langsung melalui efisiensi dengan

tidak mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing Program dan Kegiatan Seperti :

- Peningkatan Efisiensi dan efektifitas belanja langsung pengelolaan anggaran SKPD
- Peningkatan Efisiensi dan Effektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama pada program dan kegiatan yang berdampak besar untuk keperluan masyarakat
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Anggaran
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	92.638.010.140
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	124.081.750
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.825.976
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	246.534.597
Koordinasi dan Penyusunan Lapora Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.045.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semester SKPD	31.879.830
Pengamanan barang Milik daerah SKPD	142.768.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.832.616
Penata Usahaan Barang Milik daerah	22.908.500
Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	74.748.950
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.211.185
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.143.875
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.860.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.657.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	377.805.000

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	45.020.940
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	317.971.330
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.810.805
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	296.675.434
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	211.512.333
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	28.050.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	292.007.400
Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Kualitas pelayanan Publik dan tata laksana	50.542.980
Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya	33.524.550.592
Pengembangan Puskesmas	809.419.940
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.837.914.926
Pengadaan alat Kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	353.398.908
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	54.267.000
Pengadaan Obat bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan	6.488.213.681
Distribusi alat kesehatan, obat bahan habis pakai Bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas Kesehatan	102.924.732
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.197.203
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	19.345.440
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	33.622.612
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	121.470.050
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.149.100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	85.259.370
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.111.802
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	88.605.730

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	581.360.749
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	82.396.418
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	40.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	357.508.650
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	816.101.122
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	251.548.502
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	325.417.400
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	481.913.000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	35.105.723.557
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	34.000.000
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	131.853.300
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	11.416.500
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	49.399.839
Investigasi Awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca Imunisasi dan pemberian Obat Masal)	27.654.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	933.237.100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	51.252.561
Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan anak	181.835.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	104.273.128
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	173.156.600
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	127.752.500
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	122.508.800
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kesehatan Rujukan	73.999.915
Mengembangkan Mutu dan peningkatan Kompetensi teknis Sumber Daya manusia Kesehatan TK Daerah Kabupaten /Kota	967.618.440

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	67.862.250
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	85.987.500
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	218.481.250
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	70.777.000
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	28.390.000
Bimbingan teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Nara Sumber Daya Masyarakat (UKBM)	81.791.000
Badan Layanan Umum daerah (BLUD) Puskesmas Operasional Puskesmas	27.566.941.859
Belanja Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	15.890.840.000
RSUD Tapan	11.654.581.094
RSUD dr Muhammad Zein Painan	112.208.333.303

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Retribusi Daerah

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 123.084.095.325
Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan retribusi pelayanan kesehatan yang terdapat pada RSUD M Zein. RSUD Tapan dan Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan.
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 52.232.000
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan retribusi penyewaan tanah dan bangunan.

2. Lain-lain PAD yang Sah

- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp. 791.330.117
Pendapatan Dana Kapitasi JKM pada FKTP merupakan pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD

B. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 791.330.117

Lain-lain pendapatan daerah yang sah disini merupakan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Tabel.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
Retribusi Daerah	123.136.327.325	106.578.512.087	86,55
Lain-lain PAD yang sah	791.330.117	1.509.683.000	190,78
Jumlah PAD	123.927.657.442	108.088.195.087	87,22

3.1.2 Belanja

Pelaksanaan Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja OPD. Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
BELANJA			
Belanja Operasi	295.588.315.066,00	274.886.614.604,16	93.00 %
- Belanja Pegawai	123.726.997.651	114.670.375.434	92,68 %
- Belanja Barang dan Jasa	171.761.317.415	160.116.239.170,16	93,22 %
- Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000	100,00 %
Jumlah Belanja Operasi	295.588.315.066	274.886.614.604,16	93.00 %
Belanja Modal			
- Belanja Modal Tanah	366.264.920	366.264.920	100 %
- Belanja Peralatan dan Mesin	14,424,197.291	13.548.201.969	98,79 %
- Belanja Gedung dan Bangunan	24.010.661.800	22.818.989.401	95.04 %
- Belanja Modal jalan, jaringan dan Irigasi	1.189.306.500	1.189.306.500	89,66
- Belanja Modal Aset Tetap lainnya	12.925.000	12.800.000	99,03
Jumlah Belanja Modal	40.003.355.511	37.812.562790	94.542 %
JUMLAH BELANJA	335.591.670.577	312.699.177.394.,16	93,18 %
SURPLUS/ (DEFISIT)	(211.664.013.135)	(204.611.099.775,16)	96,67 %

Total realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 312. 699.117.394,16 ,- . Jumlah tersebut mencapai 93,18 % dari

total anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 335.591.670.577-. Pada Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. 295.588.315.066,- terealisasi sebesar Rp. 274.886.614.604,16 atau sebesar 93.00% yang terdiri dari belanja pegawai APBD sebesar Rp. 114.670.375.434,- atau sebesar 92,68 % dan belanja pegawai BLUD sebesar Rp. 18.059.500.491,- atau sebesar 95,62%. Sedangkan untuk Belanja Barang dan jasa dari total anggaran Rp. 171.761.317.415,- terealisasi sebesar Rp. 160,116.239,170,16 atau sebesar 93,22 % dan untuk Belanja Hibah dari total anggaran Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau sebesar 100%.

Adapun rincian Belanja Modal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.40.003.355.511,- terealisasi sebesar Rp 37.812.562.790,- atau sebesar 94.52 % terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Modal Tanah	366.264.920	366.264.920
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	6.865.300.000	6.782.100.000
3.	Belanja Modal Alat kantor dan Rumah Tangga	906.345.828	805.081,000
4.	Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan	3.479.980.908	3.349545.052
5.	Belanja Modal alat Laboratorium	50.654.920	4.828.000
6.	Belanja Modal Komputer	627.821.805	584.450.000
7.	Belanja Modal alat Eksplorasi	53.489.920	53.489.920
8.	Belanja modal alat alat produksi Pengolahan dan Pemurnia	636.637.238	636.600.000
9.	Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin BLUD	1.808.966.672	1.338.677.917
10.	Belanja Modal Modal bangunan Gedung	24.010.661.800	22.818.989.401
11.	Belanja Modal Instalasi	1.066.306.500	1.006.306.500
12.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	11.125.000	11.000.000
13.	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	1.800.000	1.800.000

	BLUD		
	Jumlah Belanja Modal	40.003.355.511	37.812.562.790

Terdapat defisit dari anggaran pendapatan dan belanja sebesar (Rp. 211.664.013.135,-) atau sebesar 96.67 % dari jumlah anggaran sebesar (Rp. 204.611.099.775,16-).

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada dasarnya dalam pencapain target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Namun ada beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah 75% diantaranya sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1.	Menejemen Puskesmas	1.205.576.750	633.754.820	52.56 %

1. Realisasi Menajemen Puskesmas sebesar 52.56 % %. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena kegiatan di tidak bisa dilaksanan oleh Puskesmas

B A B IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah basis akuntansi akrual.

- Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan LRA meliputi semua penerimaan Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak kan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.
- Penyajian Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aktiva dan Hutang.

4.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Kas dan setara Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing., dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank pada tanggal neraca.

2. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

3. Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai dan biaya lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

4. Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

5. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

6. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebanan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya , pengurusan IMB, Notaris dan Pajak.

8. Peralatan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut digunakan.

9. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai.

10. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Aset Tetap Lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap baru.

11. Konstruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang dan menjadi hak pemerintah tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah
2. Diterima oleh SKPD
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

Pendapata-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di PPKD dan SKPD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporanyang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

B A B V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

No Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
5.5.1 PENDAPATAN	106.578.394.619	100.771.702.059
a. Retribusi Daerah		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	106.464.694.619	73.127.616.618
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	113.700.000	60.400.000
b. Lain-lain PAD yang Sah		
• Pendapatan BLUD		27,583,683.685.441
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN	1.509.683.0000	
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	

Jumlah realisasi pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp. 108.088.077.619,- merupakan lain-lain pendapatan yang sah atas Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

No Perkiraan	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	108.088.077.619	100.771.702.059
5.5.2 BELANJA		
a. Belanja Operasi	274.886.614.604,16	244.264.565.666,35
• Belanja Pegawai	114.668.244.254	
100.832.529.961,35		
Jumlah tersebut merupakan Realisasi pegawai dalam Tahun Anggaran 2024.		
Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai tersebut terdiri dari atas :		
Gaji dan Tunjangan ASN	85.408.393.966	77.439.213.503
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.876.937.565	6.559.087.730
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.323,412.232	1.825.182.110
Belanja Pegawai BLUD	18.059.500.491	15.009.046.618,35
• Belanja Barang dan Jasa	160.118.370.350,16	143.232.035.705
Belanja Barang Pakai Habis	14.910.871.034	14.184.314.498

Belanja Jasa Kantor	8.181.818.667	9.689.083.944
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	33.905.646.966	24.241.697.705
Belanja Sewa Gedung dan bangunan	1.300,000	6.000.000
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.253.064.706	432.308,980
Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin	213.111.840	323.928.501
Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan	120.798.430	374.213.130
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan & Irigasi	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.356.708.498	10.086.079.614
Belanja Barang dan Jasa BLUD	90.084.171.159,16	10.804.533.964
• Belanja Hibah	100.000.000	200.000.000

No Perkiraan	Realisasi 2024	Realisasi 2023
	274.886.614.604.16	244.264.565.666,35

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.37.812.562.790,- dari total anggaran sebesar Rp. 40.003.355.511 atau sebesar 94,52 %.

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.425.768.969 9.556.996.404

Merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2024 dan 2023. Untuk Tahun 2024 realisasi belanja modal peralatan dan mesin mencapai 93,08% dari jumlah yang dianggarkan Rp.14.424.197.291,-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Alat Angkutan	6.782.100.000	0
2	Belanja Modal Alat Kantor & RT	805.081.000	122.403.350
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		8.850.000
4	Belanja Modal Alat Kedokteran & Kesehatan	3.349,545.052	922.089.860

5	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.828.000	0
6	Belanja Modal Komputer	584.450.000	288.463.400
7	Belanja Modal Alat Eksplorasi	46.920.000	
8	Belanja Modal alat Produksi ,Pengolahan dan pemurnian	636.600.000	
9	Belanja Modal Peralatan & Mesin BLUD	1.216.244.917	718.687.864
	Total	13.425.768.969	2.060.494.474

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22.818.989.401 3.806.810.529

Merupakan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023 Untuk Tahun 2024 realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 22.818.989.401,- atau sebesar 95,04%. dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.23.023.871.800

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Bangunan dan Gedung Kantor		56.080.000
2	Belanja Modal Gedung Instalasi	985.500.000	
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	21.833.489.401	3.524.290.929
4	Belanja Modal bangunan Fasilitas umum		179.567.000
2	Belanja Modal Gedung & Bangunan BLUD		46.872.600
	Total	22.818.989.401	3.806.810.529

5.2. NERACA

Neraca Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan per tanggal neraca meliputi aset, utang dan ekuitas dana. Neraca tersebut merupakan bagian Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.

Neraca Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan per tanggal 31 Desember 2024 memiliki Total Aset sebesar Rp. 223.859.534.055,69 Total Kewajiban sebesar Rp. 4.385,311,714 dan jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp. 202.857.050.748,88

Rincian atas masing-masing pos di Neraca per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

No Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
A. Aset		
1. Aset lancar	21.760.515.121,19	18.985.205.953,35
• Kas di Bendahara Penerima		
Penerimaan Daerah yang dipungut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Pendapatan BLUD dan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan.		
• Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024 tidak ada, karena sisa UYHD sudah di setor ke Kas Daerah sebelum tanggal 31 Desember 2024.		
Pada tanggal 31 Desember 2024 juga tidak terdapat kas di bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.		
• Kas di BLUD	2.946.337.246,19	3.319.080.547,35
Kas di BLUD merupakan sisa pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari 20 Puskesmas yaitu :		

NO	PUSKESMAS	Jumlah
1	Puskesmas Air Haji	558.615.643,00
2	Puskesmas Air Pura	91.887.493,00
3	Puskesmas Asam Kumbang	54.044.884,00
4	Puskesmas Balai Selasa	353.359.967,00
5	Puskesmas Barung Barung Belantai	43.104.640,00
6	Puskesmas Inderapura	118.348.960,00
7	Puskesmas Kambang	190.092.478,00
8	Puskesmas Koto Baru	80.806.788,00
9	Puskesmas Koto Berapak	68.535.080,00
10	Puskesmas IV Koto Mudik	21.921.822,00
11	Puskesmas Lumpo	33.731.602,00
12	Puskesmas Pasar Baru	213.718.308,00
13	Puskesmas Pasar Kuok	144.858.394,00
14	Puskesmas Ranah Ampek Hulu	156.026.435,00
15	Puskesmas Salido	139.326.022,00
16	Puskesmas Surantih	131.970.250,24
17	Puskesmas Tanjung Beringin	285.065.214,00
18	Puskesmas Tanjung Makmur	104.909.380,40
19	Puskesmas Tapan	103.698.606,00
20	Puskesmas Tarusan	70.315.279,55
	Total	2.964.337.246,19

• Kas Lainnya	0	0
• Piutang Pajak	0	0
• Piutang Retribusi	2.554,674.584	
• Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0	0
• Piutang kepada Pihak Ketiga	0	0
• Piutang Lainnya	0	0
• Penyisihan Piutang	0	0
• Beban Dibayar Dimuka	0	0
• Persediaan	12.762.541.074	10.116.443.796

Terdapat Persediaan akhir Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Rp. 12.762.541.074

Rincian Persediaan tahun 2024 yaitu :

• ATK	2.745,200
• Cetak	0

• Alat Listrik	
• Alat Kebersihan	0
• Materai dan Benda Pos	0
• Pembelian Pengisian Oksigen	0
• Persediaan Makanan Pokok Pasien	607.500
• Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0
• Bahan Laboratorium	0
• Bahan Kimia	0
• Persediaan Obat Dinkes dan Puskesmas	8.421.302.635
• Obat BLUD Puskesmas	170.386.914
• Obat Pengadaan RSUD Tapan	482.098.916
• Obat apotik RSUD Tapan	82.736.678
• BMHP RSUD tapan & Puskesmas	935.101.531
• Bahan Labor RSUD Tapan & Puskesmas	71. 103,673
• Obat RSUD Tapan Penerimaan dari IFK Dinkes	2.774.000
• Obat Puskesmas dan Pustu dari Dinkes	2.580.757.853
• Alat Kesehatan lainnya (RSUD Tapan)	9.232.980

No Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
2. Aset Tetap	201.412.214.805,-	159.728.024.316,63
• Tanah	5.648.610.649,-	5.282.345.729,53,-
Tanah yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2024 bertambah sebesar Rp. 366.264.920 sehingga Total tanah pada tahun 2024 menjadi Rp. 5.648.610.649. Penambahan tersebut dikarenakan adanya Pembelian Tanah untuk pembangunan Puskesmas		
• Peralatan dan Mesin	104.622.345.604,-	90.870.219.551,72,-
Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir Selatan per tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 104.622.345.604 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 90.870.219.551,72,- sehingga terdapat penambahan aset		

pada peralatan dan mesin sebesar Rp. 13.752.126.053,- penambahan tersebut di dapat kan adanya Belanja Modal peralatan dan Mesin Tahun 2024

- Gedung dan Bangunan 160.282.687.721 140.606.819.197,00
Nilai aset Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp.161.339.241.175,-, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 160.282.687.721,-. terdapat penambahan nilai gedung bangunan sebesar Rp. 19.675.868.524 ,-
-
- Jalan, Irigasi dan Jaringan 27.840.470.085,- 24.127.340.701
Terdapat penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2024.
- Aset Tetap Lainnya 17.490.000 17.490.000
Tidak terdapat penambahan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024
- Akumulasi Penyusutan (101.919.948.863,-) (88.291.315.015,00)
Terdapat penambahan pada Akumulasi Penyusutan pada Tahun 2024 .

No Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
3. Aset Tetap Lainnya	88.400.000	88.400.000
Tidak terdapat penambahan pada Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024. Aset adapun rincian aset tetap lainnya adalah :		
• Aset Tidak Berwujud	97.208.250,-	97.208.250
• Aset Lain-lain	682.064.004,-	622.763.171,-

No Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
--------------	------------------------	------------------------

B. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Pada Tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat utang perhitungan pihak ketiga.
- Utang Bunga Denda dan Commitment Fee

Pada Tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat utang bunga denda dan Commitment Fee

- **Pendapatan Diterima Dimuka**

Pada Tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat pendapatan diterima dimuka

- **Utang Beban**

Pada Tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat utang beban

- **Utang Jangka Pendek Lainnya Rp. 4.385.311.714**

Pada Tahun 2024 terdapat Pengurangan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp. 4.385.311.714

No Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
C. Ekuitas	228.244.845.769,69	176.022.552.313.,98

Jumlah tersebut merupakan selisih antara Jumlah Aset dengan Jumlah Kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada posisi per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 228.244.845.769,69 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 176.022.552.313,98

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasional dari kegiatan operasional dalam tahun 2024. Jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut :

- **PENDAPATAN ASLI DAERAH**

No Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
--------------	------------------------	------------------------

Retribusi Daerah	106.578.512.087	73.188,016,618
-------------------------	------------------------	-----------------------

Retribusi Daerah pada Tahun 2024 merupakan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu sebesar Rp. 113..700.000 sedangkan Retribusi Daerah pada Tahun 2024 Sebesar Rp.106,578,512.087

Lain-lain PAD yang Sah	-	27.583.685.441
-------------------------------	----------	-----------------------

Pada Tahun 2024 Lain-lain PAD yang Sah terletak di Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (BLUD) sedangkan pada Tahun 2023 Lain-lain

PAD yang Sah merupakan pendapatan dari Dana Kapitasi BLUD yaitu sebesar Rp.27.583,685.441,-

• **BEBAN OPERASI**

Jumlah berikut merupakan beban pegawai dalam Tahun Anggaran 2024, jumlah realisasi beban pegawai tersebut dapat terinci sebagai berikut :

No Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Pegawai		
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	114.668.355.987	100.832.529.961,35
Beban Gaji Pokok ASN	64.912.848.344	61.163.646.893
Beban Tunjangan Keluarga ASN	5.992.515.846	5.633.869.990
Beban Tunjangan Jabatan ASN	488.445.000	519.130.000
Beban Tunjangan Fungsional ASN	6.431.283.000	2.519.791.800
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	377.255.816	455.355.000
Beban Tunjangan Beras ASN	3.526.998.840	3.640.857.564
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	164.498.819	232.047.701
Beban Pembulatan Gaji ASN	908.000	846.990
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.972.101.212	2.771.016.220
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	133.372.694	123.730.708
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	399.690.283	371.168.826
No Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.383.664,185	6.51.4637.170
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.323.4412.232	1.825.182.110
- Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.447.212.732	950.860.279
- Beban Honorarium	876.199.599	853.340.000

- Beban Jasa Pengelolaan BMD	0	0
------------------------------	---	---

No Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Beban Barang dan Jasa		
Beban Barang Pakai Habis	14.905,885.534	14.184.314.498
Beban Jasa Kantor	8.146.992.987	9.689.083.944
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	33.905.646.966	24.541.697.205
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.300.000	6.000.000
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.253.064.706	432.308.980
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	213.111.840	323.928.501
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120.798.430	374.213.130
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.355.608.498	10.086.079.614.
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		9.250.000

No Perkiraan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Beban Hibah		
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000	200.000.000,00

Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan Beban-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp.106,578.394.619 .

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan Beban-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 109.815.441.603

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- | | |
|----------------|--------------------|
| • Ekuitas Awal | 176.022.552.313,98 |
|----------------|--------------------|

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan milik Dinas Kesehatan kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 208.840.865.514

- Surplus/Defisit-LO (176.877.006.881)
Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan Beban-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp. (176.877.006.881),-.
- RK
RK sebesar Rp. 203.695.320.081
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/
Kesalahan Mendasar
Terdiri dari :
Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap
Koreksi Ekuitas - Aset Lain-lain
Koreksi Ekuitas – Penyusutan
Koreksi Ekuitas - Piutang
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang Dana Bergulir
Koreksi Ekuitas - Extra Comptable
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang
Koreksi Ekuitas - Utang
Koreksi Ekuitas - Amortisasi
Koreksi Ekuitas - Setara Kas Lainnya
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara Penerimaan
Koreksi Ekuitas - Kas Bendahara Pengeluaran
Koreksi Ekuitas - Lain-lain
- Ekuitas Akhir 202.840.865,514

BAB VI PENUTUP

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan maka pada akhir tahun anggaran disusun Laporan Keuangan OPD yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan Atas Laporan Keuangan

Realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar Rp. 312.658.466.214,16 atau 93,17 %. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas, ada beberapa belanja yang tidak tercapai target indikator kinerja hal ini disebabkan adanya kesalahan perhitungan balita Gizi buruk dan ibu Hamil yang anggaran berlebih .